

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Aprita, S., & Wulandari, M. (2023). *Hukum Perikatan*. Prenada Media, Jakarta.
- Asmariah, Permana, I. G., & Semendawai, A. H. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Hewan Peliharaan (Non Ternak): Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum*. Penerbit NEM, Pekalongan.
- Chumaida, Z. V., & M. (2021). *Penegakan Hak Konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen guna Meningkatkan Indeks Kepuasan Konsumen*. Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Jenar, S. (2023). *Perbuatan Melawan Hukum*. Dalam E. Churniawan (Ed.), *Hukum Perdata*. Sada Kurnia Pustaka, Jakarta.
- Mardijanto, A., & Chandra, A. Y. R. (2026). *Buku Ajar Kesejahteraan Hewan (Animal Welfare)*. Deepublish, Yogyakarta.
- Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Miru, A., & Pati, S. (2020). *Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam KUH Perdata (BW)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Setiawan, I. K. O. (2021). *Hukum Perikatan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sihombing, A. (2023). *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Azka Pustaka, Pasaman Barat.
- Yahman. (2021). *Batas Pembeda Wanprestasi & Penipuan dalam Hubungan Kontraktual*. Jakad Media Publishing, Surabaya.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 7).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847)*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619).

Bürgerliches Gesetzbuch (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman), diundangkan pada 2 Januari 2002 (*Bundesgesetzblatt* I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang tanggal 10 Agustus 2021 (*Bundesgesetzblatt* I S. 3515).

C. Jurnal

Agustina, T. R., & Alfiana, A. (2024). *Analisis manajemen risiko "Felix Petsshop Dangdeur"*. PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 2(2), 1565–1573. DOI: <https://doi.org/10.62710/ctrh9n33>

Anadi, Y. R. (2025). *Urgency analysis of pet regulation as subject of legal protection*. Jurnal Mercatoria, 18(1), 115–121. DOI: <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v18i1.14771>

Anadi, Y. R., et al. (2025). *Konsep pengaturan hewan peliharaan sebagai objek jaminan untuk mewujudkan kepastian hukum*. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 8(1), 502–514. DOI: <https://doi.org/10.34007/jehss.v8i1.2829>

Arrahma, N., Hasanah, U., & Fitri, S. N. (2023). *Ganti rugi terhadap konsumen dalam penggunaan jasa penitipan hewan di Kota Bengkulu*. Jurnal Panorama Hukum, 8(1). DOI: <https://doi.org/10.21067/jph.v8i1.8863>

Boy, T. (2021). *Perlindungan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan hewan peliharaan menurut perspektif hukum pidana di Indonesia (Studi Putusan Nomor: 320/PID.SUS/2020/PT.DKI)*. Jurnal Hukum Adigama, 4(2), 3768–3788. DOI: <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17965>

Cevitra, M., & Djajaputra, G. (2023). *Perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum*

Perdata dan perkembangannya. *UNES Law Review*, 6(1), 2722–2731.
DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1074>

Christie, G. A., & Saly, J. N. (2022). *Perlindungan pengguna jasa penitipan hewan peliharaan terhadap kelalaian pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(2), 403–421.

Harahap, R. S. P., & Chrisanta, F. (2023). *Pembatasan klausul pada perjanjian baku dalam upaya perlindungan konsumen melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(4), 323–338.
DOI: <https://doi.org/10.56370/jhlhg.v4i4.371>

Kania, D., Tarsidi, D. Z., Sjam, D. A., & Sjam, Z. A. (2023). *Pentingnya pengetahuan perlindungan hukum terhadap hak asasi hewan peliharaan bagi warga negara Indonesia*. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial dan Politik*, 6(1), 57–66.
DOI: <https://doi.org/10.47080/propatria.v6i1.2512>

Laksana, F. (2020). *Analisis yuridis terhadap kasus gugatan perbuatan melawan hukum atas ketidakabsahan peralihan hak milik benda bergerak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1081/K/PDT/2018)*. *Kosmik Hukum*, 20(1), 15–16. DOI: <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1.6433>

Mayasari, N., Hiroyuki, A., Budinuryanto, D. C., Firmansyah, I., & Ismiraj, M. R. (2023). *Penerapan prinsip kesejahteraan hewan pada pemeliharaan ternak*. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, 12(3), 360–373. DOI: <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v12i3.42686>

Nafila, F., & Wardah, W. (2020). *Penyelesaian wanprestasi pada jasa penitipan hewan di Banda Aceh*. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 263–278.
DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.17015>

Nasution, H. R., & Harris, A. (2025). *Kedudukan konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha di Indonesia*. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(6), 470–484. DOI: <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i6.572>

Putri, A. S., Kirani, M., Sadi, M. F., & Setiawan, R. Q. (2024). *Analisis kewajiban dan perlindungan konsumen dalam kontrak jual beli*. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 505–514. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14217264>

- Sabela, L. S. (2024). *Hak asasi hewan dalam hukum Indonesia*. Crepido Journal. DOI: <https://doi.org/10.14710/crepido.6.1.1-15>
- Sari, P. P., & Rasji, R. (2021). *Perbandingan hukum Indonesia dan Austria terhadap peraturan kesejahteraan hewan dalam pengangkutan hewan ternak*. Jurnal Hukum Adigama, 4(2), 2923–2944. DOI: <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17876>
- Satya, I. G. S. R., & Mahendrayana, I. M. D. D. (2023). *Perlindungan terhadap kesejahteraan hewan menurut hukum positif di Indonesia*. Jurnal Kertha Semaya, 11(4), 762–777. DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i04.p07>
- Setia Negara, T. A. S. (2023). *Normative legal research in Indonesia: Its origins and approaches*. Audito Comparative Law Journal, 4(1), 3–14. DOI: <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>
- Setiawati, D. (2024). *Enforcing the law against animal cruelty perpetrators*. Unifikasi: Jurnal Hukum, 11(1), 1–12. DOI: <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v11i02.774>
- Sonata, D. L. (2014). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum*. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 15–35. DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Wildan, M., & Fatwa, A. F. (2024). *Pertanggungjawaban pihak pengelola usaha dalam perjanjian penitipan barang perspektif hukum Indonesia*. Risalah Hukum, 20(2), 70–80. DOI: <https://doi.org/10.30872/risalah.v20.i2.1621>
- Yasa, I. G. F., & Asikin, Z. (2023). *Tinjauan yuridis penggunaan klausula baku pada perjanjian dalam rangka perlindungan konsumen*. Commerce Law, 3(1).

D. Tugas Akhir

- Grace, A. D. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hewan Peliharaan Akibat Kerugian yang Dilakukan Pelaku Usaha Jasa Toko Hewan*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Sanjaya, S., & Hamid, U. (2020). *Iktikad Baik dalam Penggunaan Klausula Peralihan Hak Milik Hewan kepada Pelaku Usaha Jasa Penitipan Hewan di GPSPK Depok*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok.

Suseno, T. P. P. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Penitipan Hewan atas Timbulnya Kerugian oleh Pelaku Usaha Petshop Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Bandung.

E. Website

Batamnews.co.id. 2023. *Pemilik Petshop De Parlour Minta Maaf, Pemilik Dudu Buat Surat Terbuka*. <https://www.batamnews.co.id/berita-100615-pemilik-petshop-de-parlour-minta-maaf-pemilik-dudu-buat-surat-terbuka.html>. Diakses 26 Juni 2026.

Databoks Katadata. 2023. *Cats Are the Most Popular Pets in Indonesia, According to Rakuten Insight*. <https://databoks.katadata.co.id>. Diakses 23 Januari 2026.

Hukumonline. 2025. *Apa yang Dimaksud Benda Bergerak dan Tidak Bergerak?* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenai-benda-bergerak-dan-benda-tidak-bergerak-cl4712/>. Diakses 23 Januari 2026.

Kompas.com. 2022. *Kasus Anjing Mati Usai Dititipkan di "Pet Shop" Serpong Berakhir Damai*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/07/26/20350331/kasus-anjing-mati-usai-dititipkan-di-pet-shop-serpong-berakhir-damai>. Diakses 27 Juni 2026.

kumparanNEWS. 2026. *Kucing Sphynx Bernama Noci Mati Usai Lahiran, Klinik Hewan di BSD Disomasi*. <https://kumparan.com/kumparannews/kucing-sphynx-bernama-noci-mati-usai-lahiran-klinik-hewan-di-bsd-disomasi-27GQKJPlvIs>. Diakses 27 Juni 2026.

POI Data Platform. 2025. *How Many Pet Stores Are in Indonesia?* <https://www.poi.co.id>. Diakses 23 Januari 2026.

Prasetyo, A. 2022. *Perjanjian Penitipan Hewan dan Masalah Hukum yang Sering Muncul*. <https://www.hukumonline.com>. Diakses 23 Januari 2026.

Proceedings of Animal Welfare Indonesia 1st Conference. 2022. *Proceedings of Animal Welfare Indonesia 1st Conference*, Gran Mahakam Hotel Jakarta, 14 Desember 2022. <https://animalwelfareindonesia.org>. Diakses 23 Januari 2026.

Rahmawati, D. E. *Tanpa Tahun. Hukumnya Jika Hewan Peliharaan yang Berkeliaran Mati Ditabrak*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-jika-hewan-peliharaan-yang-berkeliraran-mati-ditabrak-lt5e06c0928eb87/>. Diakses 13 April 2026.

Tempo.co. 2023. *Cari Keadilan Matinya Anjing JJ, LBH PSI Laporkan Petshop di Depok ke Polisi*. <https://www.tempo.co/hukum/cari-keadilan-matinya-anjing-jj-lbh-psi-laporkan-petshop-di-depok-ke-polisi-204820>. Diakses 13 April 2026.